

## DAFTAR ISI

SAMPUL MUKA .....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
NAMA PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PENETAPAN PANITIA UJIAN TAHAP I (TERTUTUP).....	vi
LEMBAR PENETAPAN PANITIAN UJIAN TAHAP II (TERBUKA).....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	viii
SUMMARY.....	xiv
RINGKASAN .....	xix
ABSTRACT.....	xxiv
DAFTAR ISI .....	xxv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxviii
DAFTAR PERATURAN ASING.....	xxxiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xxxiv
DAFTAR TABEL.....	xxxv
DAFTAR BAGAN.....	xxxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan permasalahan.....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Kerangka teoritis .....</b>	<b>12</b>
1.5.1 Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.....	12
1.5.2 Hukum Islam sebagai perspektif.....	17
1.5.3 Prinsip hukum.....	23
1.5.4 Teori pembatasan hak.....	26
1.5.5 Teori tujuan Hukum Islam ( <i>maqashid syariah</i> ).....	32
1.5.6 Konsep Hukum Tanah Nasional .....	36
1.5.7 Konsep Hukum Islam .....	39
1.5.8 Konsep pemilikan dan penguasaan .....	45
<b>1.6 Originalitas Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>1.7 Metode Penelitian.....</b>	<b>53</b>
1.7.1 Tipe penelitian .....	53
1.7.2 Pendekatan yang digunakan.....	55
1.7.3 Sumber bahan hukum.....	56
1.7.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	57
1.7.5 Teknik analisa bahan Hukum .....	58
<b>1.8 Pertanggungjawaban Sistematis .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB II FILOSOFI PEMBatasan PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN UNTUK PERSEORANGAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
<b>2.1 Hakikat tanah bagi manusia dalam ajaran Islam.....</b>	<b>62</b>
<b>2.2 Tanah bagi bangsa dan negara Indonesia .....</b>	<b>73</b>
<b>2.3 Hak atas tanah untuk keperluan pertanian.....</b>	<b>82</b>
<b>2.4 Subjek hak perseorangan .....</b>	<b>90</b>
<b>2.5 Hakikat kepemilikan dan penguasaan tanah dalam Islam .....</b>	<b>99</b>
<b>2.6 <i>Maqashid syariah</i> sebagai dasar dilakukannya pembatasan hak.....</b>	<b>117</b>

2.7	Pandangan ahli fiqih atas pembatasan hak .....	123
2.8	Pembatasan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam Islam .....	127
2.9	Pembatasan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah pertanian dalam Hukum Tanah Nasional.....	138
2.10	Hakikat pembatasan luas tanah pertanian dalam UU No. 56 Prp 1960 ....	148
2.11	Pembatasan dalam rangka pelaksanaan <i>landreform</i> dan perkembangannya	152
2.12	Pembatasan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah pertanian untuk perseorangan di negara Malaysia .....	172
<b>BAB III PRINSIP HUKUM DALAM PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN UNTUK PERSEORANGAN</b>		
3.1	Prinsip umum.....	178
3.1.1	Prinsip Hukum Tanah Nasional.....	178
3.1.2	Prinsip Hukum Islam.....	196
3.2	Prinsip khusus .....	209
3.2.1	Prinsip darurat ( <i>dharruriyah</i> ).....	209
3.2.2	Prinsip kemaslahatan ( <i>maslahah mursalah</i> ) .....	211
3.2.3	Prinsip realitas ( <i>Al waqi'</i> ).....	215
3.2.4	Prinsip prioritas ( <i>Al aulawiyah</i> ).....	216
<b>BAB IV PENGATURAN PEMBATASAN LUAS TANAH PERTANIAN UNTUK PERSEORANGAN</b>		
4.1	Pengaturan penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian.	224
4.1.1	Objek hak atas tanah yang dibatasi.....	224
4.1.2	Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan luas minimum dan maksimum.....	236
4.1.3	Penetapan luas minimum.....	244
4.1.4	Penetapan luas maksimum.....	248
4.2	Pengaturan kewajiban, larangan dan akibat hukum atas tanah kelebihan batas .....	251
4.2.1	Kewajiban melapor .....	251
4.2.2	Larangan mengalihkan hak tanpa ijin .....	252
4.2.3	Kewajiban mencegah terjadinya kepemilikan melampaui batas.....	253
4.2.4	Larangan pemindahan hak atas pertanian menjadi lebih kecil dari batas minimum.....	254
4.2.5	Akibat hukum pelanggaran dan pengambilalihan hak atas tanah kelebihan batas maksimum.....	255
4.3	Pengaturan ganti kerugian .....	271
4.4	Pengaturan pembagian tanah ( <i>land distribution</i> ) pertanian kelebihan maksimum.....	275
4.4.1	Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 .....	275
4.4.2	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.....	281
4.5	Pengaturan kelembagaan pelaksanaan <i>landreform</i> .....	288
4.5.1	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional .....	291
4.5.2	Panitia <i>Landreform</i> dan Panitia Pertimbangan <i>Landreform</i> (PPL) .....	297
4.5.3	Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)	301
<b>BAB V</b>	.....	<b>313</b>
5.1	Kesimpulan .....	313
5.2	Saran .....	314
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>316</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ketetapan MPR Sementara Nomor II Tahun 1960 Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan MPR Sementara Nomor III Tahun 1963 Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup

Ketetapan MPR Sementara Nomor XXV Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam *Vorstenlands Grondhuurreglemen* atau Penghapusan Hak Konversi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang mempunyai titel menurut Hukum Eropa yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 182)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Netherland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1955)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1956)

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1956)

Undang-undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan *Canon* dan *Cijns* atas Hak-hak *Erfact* dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1957)

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah Partikelir (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 1958)
- Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 162 tahun 1958 TLN No. 1690)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960)
- Undang-undang Nomor 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1960)
- Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158)
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1960 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2117 Tahun 1960)
- Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 170) tentang Perubahan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 153)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada diatasnya
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang *Landreform* (Lembaran Negara No. 63 Tahun 1963)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Nomor 97 Tlm Nomor 2690)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Land reform* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No.109 Tambahan Lembarana Negara No. 2701)

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pembubaran Pengadilan Agraria
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 149)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (LNRI Tahun 2009 Nomor 161, TLN RI Nomor 5080)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tam Bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 112 Tambahan Lembaran Negara No. 2702)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah secara *Absentee* oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098)
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 290)
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172)

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Penyelenggaraan *Landreform*

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia *Landreform*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Penyelenggaraan *Landreform*

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pelaksanaan *Landreform*

Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041)

Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 tanggal 5 Januari 1960 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

**DAFTAR PERATURAN ASING**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Kanun Tanah Negara 1965 (Malaysia)





**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 180/K/Sip/1970

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 *Judicial Review* atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIII/2015



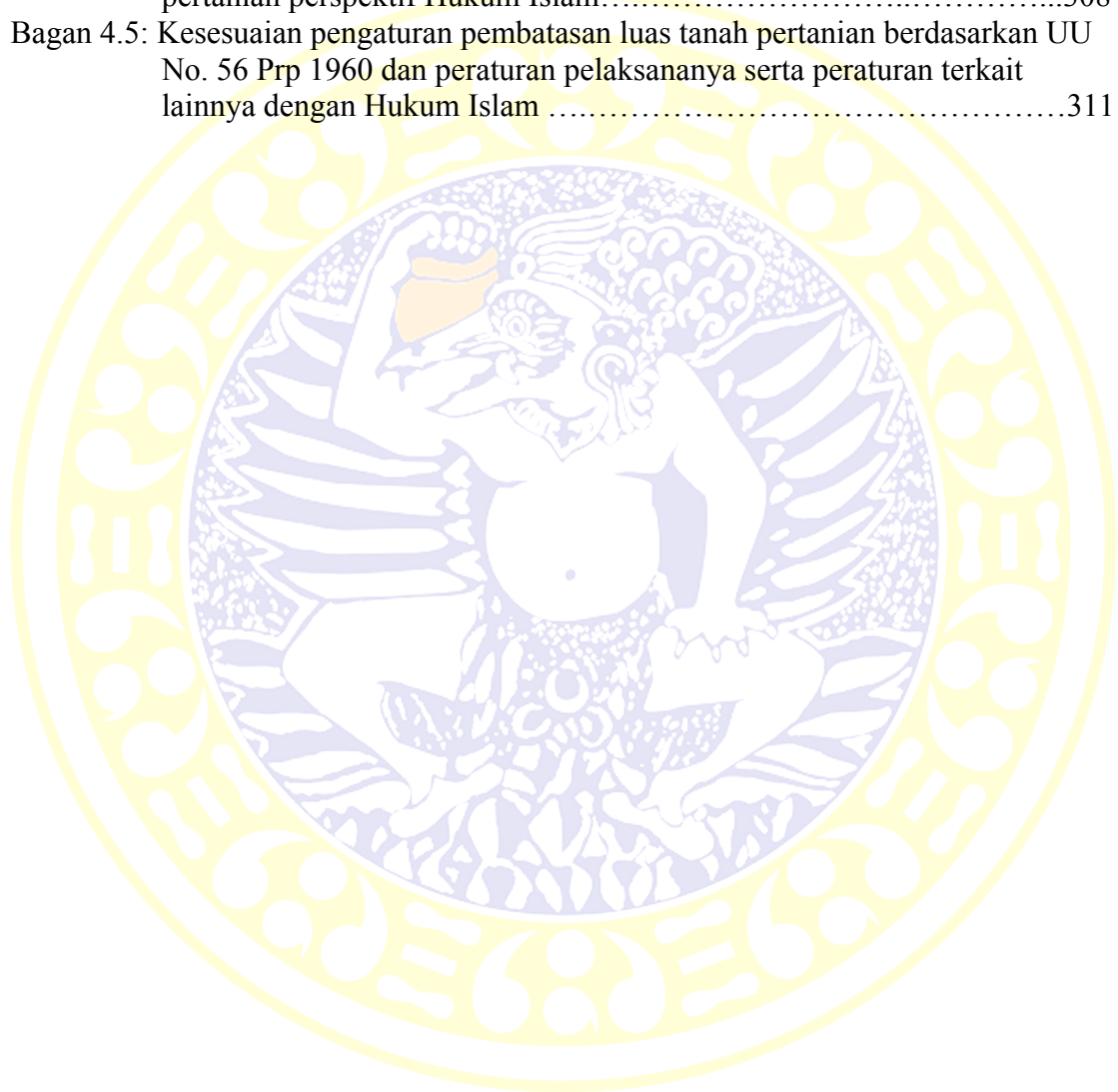
## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Batasan luas minimum dan maksimum hak atas tanah pertanian untuk perseorangan berdasarkan jenis hak .....	223
Tabel 4.2: Golongan daerah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk.....	237
Tabel 4.3: Luas tanah pertanian tahun 2017 berdasarkan jenisnya .....	238
Tabel 4.4: Luas maksimum tanah pertanian berdasarkan sawah dan tanah kering.....	247
Tabel 4.4: Akibat hukum atas pelanggaran ketentuan luas tanah pertanian.....	254



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1: Hukum Tanah Nasional dalam Negara Hukum Pancasila.....	38
Bagan 1.2: Lapisan atau hierarki Hukum Islam.....	43
Bagan 4.1: Pengaturan pembatasan luas pemilikan dan penguasaan hak atas tanah pertanian di dalam Hukum Tanah Nasional.....	220
Bagan 4.2: Pengaturan distribusi tanah kelebihan batas berdasarkan PP No. 224 Tahun 1961 dan Perpres No. 86 Tahun 2018.....	285
Bagan 4.3: Struktur Pengaturan PPL dan GTRA.....	301
Bagan 4.4: Pengaturan pembatasan luas pemilikan dan penguasaan hak atas tanah pertanian perspektif Hukum Islam.....	308
Bagan 4.5: Kesesuaian pengaturan pembatasan luas tanah pertanian berdasarkan UU No. 56 Prp 1960 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan terkait lainnya dengan Hukum Islam .....	311



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1: Siklus pemilikan hak atas tanah bagi subjek Hukum Perseorangan.....48

